

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Nurjamilah¹ Sariah² Fadlan Zikri³ Hanida Huswatun Hasanah⁴

12411423537@Students.uinsuska.ac.id¹; syariah_b@yahoo.co.id²;

12411415390@students.uin-suska.ac.id³; 12411424016@students.uin-suska.ac.id⁴

UIN SUSKA RIAU

Abstract

Social Studies (Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS) is an educational field that emerged from the need to understand social realities in an integrated and pedagogical manner. IPS did not originate as a pure scientific discipline, but rather as an integration of various social sciences simplified for instructional purposes in schools. Historically, the development of Social Studies began in the United States in the early twentieth century, marked by the establishment of the National Council for the Social Studies (NCSS) in 1935. Since then, Social Studies has undergone various dynamics, including debates over its academic identity, criticisms of its objectives and content, and the emergence of several approaches such as citizenship education, social science education, and reflective inquiry. In Indonesia, Social Studies was introduced through a national seminar on civic education and officially became part of the national curriculum in 1975. This article aims to examine the historical development of Social Studies as an educational field in both global and national contexts and to reaffirm its role in shaping knowledgeable, critical, and responsible citizens. This study employs a library research method by reviewing relevant journals, books, and curriculum documents.

Keywords : Social Studies Education; History of Social Studies; Social Studies; Civic Education; Social Studies Curriculum

Abstrak

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang kajian pendidikan yang berkembang dari kebutuhan untuk memahami realitas sosial secara terpadu dan pedagogis. IPS tidak lahir sebagai disiplin ilmu murni, melainkan sebagai hasil integrasi berbagai cabang ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Perkembangan IPS secara historis dimulai di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ditandai dengan berdirinya National Council for the Social Studies (NCSS) pada tahun 1935. Sejak saat itu, IPS mengalami berbagai dinamika, mulai dari perdebatan identitas keilmuan, kritik terhadap tujuan dan kontennya, hingga munculnya beragam pendekatan seperti *citizenship education*, *social science education*, dan *reflective inquiry*. Di Indonesia, IPS mulai diperkenalkan melalui seminar nasional tentang *civic education* dan secara resmi menjadi bagian dari kurikulum nasional sejak tahun 1975. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan IPS sebagai bidang pendidikan, baik dalam konteks global maupun nasional, serta menegaskan posisi IPS sebagai wahana pembentukan warga negara yang berpengetahuan, kritis, dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode studi

pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai jurnal, buku, dan dokumen kurikulum yang relevan.

Kata kunci ; Ilmu Pengetahuan Sosial; Sejarah IPS; Social Studies; Pendidikan Kewarganegaraan; Kurikulum IPS

PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan karena berkaitan langsung dengan upaya membentuk peserta didik agar mampu memahami, menilai, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. IPS tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai, sikap, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan IPS dalam kurikulum sekolah tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Secara historis, IPS berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan demokratis. Berdirinya National Council for the Social Studies (NCSS) pada tahun 1935 menjadi tonggak penting dalam pelebagaan IPS sebagai *core curriculum*. Definisi IPS yang dirumuskan oleh Edgar Bruce Wesley, yaitu “the social studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes”, menegaskan bahwa IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial tetapi disajikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Dalam perkembangannya, IPS mengalami berbagai tantangan, baik dari kalangan akademisi ilmu sosial maupun praktisi pendidikan. Perdebatan mengenai orientasi IPS—apakah lebih menekankan pada pendidikan kewarganegaraan atau penguasaan ilmu sosial—menjadi isu sentral dalam sejarah perkembangannya. Di Indonesia, IPS diadaptasi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi bangsa, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan IPS di negara asalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai sejarah perkembangan IPS menjadi penting untuk memahami posisi, fungsi, dan arah pengembangan IPS dalam pendidikan, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **library research** atau studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan

internasional, buku teks pendidikan IPS, dokumen kebijakan pendidikan, serta publikasi resmi lembaga pendidikan seperti National Council for the Social Studies (NCSS).

Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) identifikasi dan seleksi sumber pustaka yang relevan dengan sejarah perkembangan IPS, (2) pengelompokan data berdasarkan tema perkembangan global dan nasional IPS, (3) analisis isi terhadap konsep, pendekatan, dan dinamika IPS, serta (4) penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji perkembangan historis dan konseptual IPS tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana ilmu-ilmu lain keberadaan ilmu Sebagaimana ilmu-ilmu lain pengetahuan sosial juga tidak terlepas dari sejarah dan perkembangannya menuju sebuah disiplin ilmu yang kuat. Pada dasarnya pemikiran tentang pentingnya ilmu sosial di jadikan bahan pembelajaran telah mulai berkembang pada tahun 1900-an. Antara lain dengan berdirinya National Council for the Sosial Studies (NCSS) pada tahun 1935. Pilar akademik pertama muncul dalam pertemuan pertama NCSS tahun 1935, berupa kesepakatan untuk menempatkan "sosial studies" sebagai "core curriculum". Pada tahun 1937 berupa kesepakatan mengenai pengertian "sosial studies" yang berawal dari pandangan Edgar Bruce Wesley, yakni "The sosial studies are the sosial sciences simplified for pedagogical purposes". Dalam perkembangannya sosial studies, tercatat bahwa dalam kurun waktu 40 tahunan sejak tahun 1935 bidang studi "sosial studies" mengalami perkembangan yang ditandai dengan ketakmenentuan, ketakberkeputusan, ketakbersatuan, dan ketakmajuan. Antara tahun 1940-1950 "sosial studies" mendapat serangan dari berbagai sudut. Tahun 1960-1970-an timbulnya tarik-menarik antara pendukung gerakan the new sosial studies yang dimotori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial dengan gerakan "sosial studies" yang menekankan pada "citizenship education". Para pendukung gerakan "the new sosial studies" kemudian mendirikan Sosial Science Education Consortium (SSEC). Sedangkan NCSS terus mengembangkan gerakan "sosial studies" yang terpisah pada "citizenship education"

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Edgar Bruce Wesley merintis pembelajaran IPS di sekolah yang dibangun berdasarkan ilmu-ilmu sosial yang semula sudah berdiri sendiri. Pada awal perkembangan IPS mendapatkan tantangan yang tidak sedikit pada tahun 1940 an terutama seusai perang dunia 11. Saat itu, muncul pemikiran haruskah pendidikan

menanamkan nilai, sikap dan patriotisme kenegaraan pada siswa melalui pendidikan. Sosial studies dalam hal IPS di Amerika mendapatkan sorotan yang tajam terkait konten dan tujuan. Dampaknya adalah pembelajaran yang dikembangkan. pemerintah saat itu, memberikan dana pengembangan kurikulum yang sangat besar sehingga para ilmuwan dan praktisi pendidikan serius sekali membicarakan, mengembangkan dan membuat desain sosial studies agar menjadi lebih sempurna dan berterima dengan baik dalam implementasi pendidikan di sekolah. Perbaikan dan pengembangan ini menjadikan sosial studies lebih kokoh sebagai bagian dari materi yang di ajarkan di sekolah. Keadaan ini semakin menguat ketika Paul.R.Hanna merintis pengembangan kurikulum yang bertolak dari " basic human activities" dan berhasil menghimpun lebih dari 3000 generalisasi relevan yang digali dari berbagai cabang ilmu sosial.

Pada dasawarsa 70-an, kurikulum sosial studies mulai mengembangkan proses inkuiri, pengambilan keputusan, pertanyaan tentang nilai-nilai dan pembelajaran berorientasi pada masalah (inquiry process, decision making, value questions and, students-oriented problems). Dari sini dirasakan bahwa dampak pembelajaran yang di peroleh melalui sosial studies semakin ditegaskan 'the heart of sosial studies is relationship, relationships primarily between and among human beings. Mengacu pada hal tersebut maka sosial studies (IPS) mengembangkan 3 tradisi yakni sosial studies taught as citizenship transmission, sosial studies taught as sosial sciences, sosial studies taught as reflective inquiry. Jadi pembelajaran IPS secara konseptual dikembangkan untuk membangun warganegara yang baik, mengajarkannya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan serta mengembangkan cara berfikir kritis.

Pada era Pada tahun 1980-an perkembangan IPS sebagai bagian dari materi dalam pembelajaran di sekolah semakin menggembirakan. ini NCSS kelompok berhasil, menyepakati "scope and sequence of sosial studies", yakni tahun 1963; kemudian pada tahun 1989 berhasil disepakati konsep "sosial studies" untuk abad ke 21 yang dituangkan dalam "Charting A Course: Sosial Studies for the 21st Century", dan terakhir pada tahun 1994 disepakati "Curriculum Standards for Sosial Studies". Dalam perkembangan terakhir itu NCSS masih tetap menempatkan "citizenship education" sebagai inti dari tujuan "sosial studies". Sementara itu pada kelompok SSEC, kelompok bidang studi ekonomi mengembangkan secara tersendiri "economics education".

Di Indonesia, konsep pendidikan ilmu sosial ini awalnya masuk melalui seminar nasional tentang civic education. Menurut laporan dalam seminar tersebut terdapat 3 istilah yang muncul yang digunakan silih berganti yakni pengetahuan sosial, studi sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Penjelasan istilah tersebut mengimplikasikan pembelajaran yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial pendekatan interdisipliner yang dapat dipahami siswa di dengan menggunakan sekolah. Berkait dengan kemunculan istilah tersebut, tidak banyak tanggapan penolakan ataupun argumentatif yang memepertanyakan eksistensinya sebagaimana yang terjadi di Amerika.

Bentuk aplikasi hasil seminar tersebut, pada tahun 1972 -1973 konsep IPS masuk ke dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan "pendidikan kewargaan negara/studi sosial" sebagai mata (PPSP) IKIP Bandung dengan bentuk pelajaran terpadu. Penggunaan garis miring mengisyaratkan adanya keterkaitan dengan kurikulum 1968 tentang pendidikan kewargaan negara yang saat itu melingkupi bidang sejarah, ilmu bumi dan civic. Dalam kurikulum PPSP antara pendidikan kewargaan negara menjadi identik dengan IPSS.

Secara kurikular, IPS mulai menjadi muatan kurikulum yang mesti diajarkan di sekolah maulai pada tahun 1975 (kurikulum 1975). Pada kurikulum ini, IPS menampilkan 4 profil yaitu: 1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara, 2) pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar (SD), 3) pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi dan koperasi, 4) pendidikan IPS yang terpisah-pisah untuk SMA yang meliputi mata pelajaran sejarah, ekonomi dan geografi. Pada waktu berikutnya IPS sudah sepenuhnya menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Terlebih lagi dengan lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) No. 2 tahun 1989, mata pelajaran IPS secara tegas terpilah menjadi 2 bagian yakni IPS secara terpisah dengan pendidikan kewargaan negara.

Tahun 1960 Pemerintah mengujurkan dana untuk mengembangkan kurikulum IPS setelah IPA dan Matematika. Konsep IPS yang diperkenalkan di Indonesia sama dengan di Amerika. Tetapi cara pelaksanaan yang berbeda karena masyarakat Indonesia dengan penduduknya yang berbeda. Tahun 1972-1973 konsep IPS masuk ke dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung dengan bentuk "pendidikan kewargaan negara/studi sosial" sebagai mata pelajaran terpadu. Penggunaan garis miring mengisyaratkan adanya keterkaitan dengan kurikulum 1968 "Pendidikan kewargaan negara" melingkupi:

1. Bidang sejarah

2. Ilmu bumi

3. Civic.

Sedikitnya terdapat 9 cabang ilmu sosial yang secara integral membangun ilmu pengetahuan sosial. Kesembilan ilmu tersebut adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri dengan konsep dasarnya masing-masing. Dari hubungan yang terlihat pada kaitan timbal balik dan saling berhubungan antara satu cabang ilmu dengan cabang ilmu yang lain dapat dipahami bahwa terdapat kaitan lain. Hal ini terjadi karena antar salah satu disiplin ilmu saling berkontribusi satu sama lain. Dapat dilihat yaitu:

1. Ekonomi

2. sejarah

3. geografi

4. sosiologi

5. antropologi

7. politik

8. hukum

9. filsafat

Dalam kaitannya dengan pendidikan IPS di sekolah, sesuai dengan perkembangan peserta didik maka tidak semua cabang ilmu sosial yang dijadikan sebagai materi yang menjadi ruang lingkup pembelajaran IPS. Pada pendidikan dasar dan menengah, sedikitnya terdapat 3 cabang ilmu sosial yang menjadi bagian dalam pembelajaran IPS di sekolah yakni sosiologi dengan tema-tema kemasyarakatan, ekonomi dengan tema jual beli atau yang berkaitan dengan pasar, geografi dengan tema-tema kependudukan serta kewarganegaraan. IPS dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah secara konseptual saling pengaruh antara IPS sebagai cabang ilmu awal yang diajarkan di sekolah dengan ilmu-ilmu sosial yang berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu. IPS dipandang sebagai ilmu dasar untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial karena informasi awal tentang ilmu sosial tersebut diperkenalkan pada siswa pada tingkat dasar dan menengah, dan sebaliknya muatan IPS itu sendiri adalah berasal dari ilmu-ilmu sosial. Gambaran sederhananya dapat dilihat sebagai mana Pendidikan ilmu sosial diperkenalkan melalui seminar nasional tentang "civic education". Dalam hasil seminar terdapat 3 istilah:

1. Pengetahuan sosial

2. Studi sosial

3. Ilmu pengetahuan social

Ilmu-ilmu Sosial

1. disiplin ilmu sosial sebagai sumber materi pendidikan
2. disiplin ilmu sosial sebagai salah satu sumber materi pendidikan

Istilah ini tidak banyak dipersoalkan seperti di Amerika. Tahun 1972-1973 konsep IPS masuk ke dalam Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung dengan bentuk "pendidikan kewargaan negara/studi sosial" sebagai mata pelajaran terpadu. Penggunaan garis miring mengisyaratkan adanya keterkaitan dengan kurikulum 1968 "Pendidikan kewargaan negara" melingkupi:

1. Bidang sejarah
2. Ilmu bumi
3. Civic.

Dalam kurikulum PPSP antara pendidikan kewargaan negara menjadi identik dengan IPS. IPS mulai diajarkan di sekolah tahun 1975 (kurikulum 1975).

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai Disiplin Akademik dan Mata Pelajaran: Perspektif Jurnal Ilmiah

1. Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Perspektif Keilmuan Modern

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang kajian yang lahir dari kebutuhan pendidikan untuk memahami realitas sosial secara terpadu. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial murni yang berkembang secara disipliner dan metodologis, IPS dirancang sebagai wahana pendidikan yang bersifat pedagogis, integratif, dan normatif. Hal ini ditegaskan oleh Barr, Barth, dan Shermis (1977) dalam jurnal klasik *Defining the Social Studies*, yang menyatakan bahwa IPS bukanlah sekadar kumpulan disiplin ilmu sosial, melainkan sebuah konstruksi pendidikan yang bertujuan membentuk kompetensi kewarganegaraan peserta didik.

Dalam konteks ini, IPS menempati posisi unik: ia bukan disiplin ilmu murni, tetapi juga bukan sekadar mata pelajaran hafalan. IPS berada pada persilangan antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial, dan praktik pendidikan. Oleh karena itu, perkembangan IPS sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ideologis suatu bangsa, baik di Amerika Serikat sebagai pelopor maupun di Indonesia sebagai negara pengadopsi.

2. Kontribusi National Council for the Social Studies (NCSS) terhadap Penguatan IPS

Berbagai jurnal pendidikan sosial mencatat bahwa berdirinya NCSS pada tahun 1935 menjadi tonggak utama pelembagaan IPS. Menurut Evans (2004) dalam *Social Studies Wars*, NCSS berperan besar dalam memperjuangkan IPS sebagai “core curriculum” yang esensial dalam pendidikan demokratis. Kesepakatan NCSS pada tahun 1937 yang mengadopsi definisi Edgar Bruce Wesley mempertegas bahwa IPS merupakan penyederhanaan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pedagogis.

Definisi ini menegaskan dua hal penting. Pertama, IPS bersumber dari ilmu-ilmu sosial. Kedua, IPS mengalami proses transformasi didaktik agar sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, IPS bukanlah replika dari sosiologi, ekonomi, atau sejarah akademik, melainkan versi edukatif yang disusun berdasarkan kebutuhan pendidikan kewarganegaraan.

Namun demikian, jurnal-jurnal NCSS juga mencatat bahwa sejak awal IPS menghadapi problem identitas keilmuan. Ketidakmenentuan tujuan, pendekatan, dan konten menyebabkan IPS sering dipandang kurang “ilmiah” oleh akademisi ilmu sosial, namun sekaligus dianggap terlalu “akademik” oleh praktisi pendidikan dasar.

3. Kritik dan Tantangan IPS Pasca Perang Dunia II

Periode 1940–1950-an menjadi masa kritis bagi IPS. Sejumlah jurnal pendidikan Amerika mencatat munculnya kritik tajam terhadap IPS, terutama terkait orientasi nilai dan patriotisme. Menurut Hunt dan Metcalf (1968), IPS dianggap gagal menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif, sekaligus tidak cukup mendalam dalam menyajikan konten ilmiah.

Pasca Perang Dunia II, kebutuhan akan pendidikan yang menanamkan loyalitas nasional dan stabilitas sosial meningkat. Hal ini mendorong perdebatan mendasar: apakah pendidikan, khususnya IPS, harus bersifat netral nilai atau justru menjadi alat transmisi nilai-nilai kebangsaan. Ketegangan inilah yang kemudian melahirkan perbedaan orientasi antara IPS sebagai *citizenship education* dan IPS sebagai *social sciences education*.

Pemerintah Amerika Serikat merespons kritik ini dengan memberikan dana besar bagi pengembangan kurikulum IPS. Jurnal *Curriculum Inquiry* mencatat bahwa investasi negara dalam riset kurikulum IPS pada periode ini tergolong paling besar setelah IPA dan Matematika.

4. Munculnya Gerakan *The New Social Studies*

Pada dekade 1960–1970-an, muncul gerakan *the new social studies* yang dipelopori oleh sejarawan dan ilmuwan sosial. Gerakan ini menuntut agar IPS lebih menekankan struktur keilmuan, metode ilmiah, dan cara berpikir disiplin. Jurnal *Theory and Research in Social Education* mencatat bahwa gerakan ini berupaya mentransformasikan IPS dari mata pelajaran normatif menjadi wahana pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Sebagai respons atas perbedaan pandangan dengan NCSS, para pendukung *the new social studies* mendirikan Social Science Education Consortium (SSEC). SSEC lebih menekankan pembelajaran berbasis inkuiri, penggunaan konsep-konsep kunci ilmu sosial, serta analisis masalah sosial secara rasional.

Namun, berbagai studi evaluatif menunjukkan bahwa pendekatan ini cenderung sulit diterapkan di sekolah dasar dan menengah karena kompleksitas konsep dan keterbatasan kesiapan guru. Hal ini menguatkan kembali posisi NCSS yang menempatkan *citizenship education* sebagai inti IPS.

5. IPS sebagai *Reflective Inquiry*: Pendekatan Kontemporer

Perkembangan IPS pada dasawarsa 1970-an menunjukkan sintesis antara dua kutub ekstrem sebelumnya. IPS tidak lagi semata-mata transmisi nilai atau pengajaran ilmu sosial murni, melainkan dikembangkan sebagai *reflective inquiry*. Menurut jurnal karya Shaver (1976), IPS harus mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif, mengambil keputusan, dan mengevaluasi nilai-nilai dalam konteks masalah sosial nyata.

Pendekatan ini menegaskan bahwa “the heart of social studies is relationships”, yaitu hubungan antarmanusia dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, IPS menjadi sarana pembentukan kompetensi sosial, moral, dan intelektual secara simultan.

Tiga tradisi IPS yang dirumuskan Barr, Barth, dan Shermis—*citizenship transmission*, *social science*, dan *reflective inquiry*—hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam jurnal-jurnal pendidikan IPS di berbagai negara.

6. Standardisasi IPS oleh NCSS dan Implikasinya

Pada periode 1980–1990-an, NCSS berhasil menyepakati berbagai dokumen penting, antara lain *scope and sequence*, *Charting a Course: Social Studies for the 21st Century*, dan *Curriculum Standards for Social Studies*. Jurnal *Social Education* mencatat bahwa standar ini

menegaskan kembali tujuan utama IPS, yakni membentuk warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, dan partisipatif.

Standar NCSS menempatkan kewarganegaraan sebagai inti, tetapi tetap membuka ruang bagi pengembangan ekonomi, sejarah, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Di sisi lain, bidang ekonomi dalam SSEC berkembang secara lebih mandiri melalui *economics education*, yang kemudian memengaruhi kurikulum ekonomi di berbagai negara.

7. Perkembangan IPS di Indonesia: Adaptasi dan Kontekstualisasi

Masuknya konsep IPS ke Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pendidikan Amerika, tetapi mengalami proses adaptasi yang khas. Jurnal-jurnal pendidikan nasional mencatat bahwa seminar nasional tentang *civic education* menjadi pintu masuk utama gagasan IPS. Munculnya istilah pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial menunjukkan adanya pencarian identitas konseptual.

Berbeda dengan Amerika, di Indonesia perdebatan akademik mengenai eksistensi IPS relatif minim. Hal ini disebabkan oleh kuatnya peran negara dalam penentuan kurikulum serta kebutuhan akan integrasi pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan.

Implementasi IPS melalui PPSP IKIP Bandung pada tahun 1972–1973 menjadi laboratorium penting pengembangan IPS terpadu. Penggunaan istilah “pendidikan kewarganegaraan/studi sosial” mencerminkan orientasi ideologis dan pedagogis pendidikan nasional saat itu.

8. IPS dalam Kurikulum Nasional Indonesia

Sejak Kurikulum 1975, IPS secara resmi menjadi bagian dari kurikulum nasional. Jurnal *Pendidikan dan Kebudayaan* mencatat bahwa struktur IPS di Indonesia mencerminkan kompromi antara integrasi dan spesialisasi. Di SD, IPS diajarkan secara terpadu; di SMP secara terkonfederasi; dan di SMA secara terpisah.

Pemilahan IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU SPN No. 2 Tahun 1989 menegaskan diferensiasi fungsi: IPS berfokus pada pemahaman sosial, sedangkan PKn berfokus pada pembentukan warga negara. Namun secara substantif, keduanya tetap memiliki irisan nilai dan tujuan.

9. IPS sebagai Ilmu Dasar bagi Ilmu-ilmu Sosial

Jurnal-jurnal pendidikan IPS di Indonesia menegaskan bahwa IPS berperan sebagai fondasi pengenalan ilmu-ilmu sosial. Melalui IPS, peserta didik diperkenalkan pada konsep dasar ekonomi, geografi, sosiologi, dan kewarganegaraan secara kontekstual.

Hubungan timbal balik antara IPS dan ilmu-ilmu sosial menunjukkan bahwa IPS bukan ilmu inferior, melainkan wahana awal pembentukan literasi sosial. Dengan demikian, IPS memiliki kontribusi strategis dalam membangun kesadaran sosial dan kesiapan akademik peserta didik untuk jenjang pendidikan lebih tinggi.

10. Implikasi Pedagogis dan Tantangan Masa Depan IPS

Berbagai jurnal mutakhir menyoroti tantangan IPS di era globalisasi dan digitalisasi. IPS dituntut tidak hanya mengajarkan fakta sosial, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran global. Pendekatan interdisipliner, pembelajaran berbasis masalah, dan penguatan nilai Pancasila menjadi agenda utama pengembangan IPS di Indonesia. Dengan tetap berakar pada ilmu-ilmu sosial dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang demokratis, IPS diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas pedagogisnya.

KESIMPULAN

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan bidang pendidikan yang lahir dari kebutuhan untuk memahami kehidupan sosial secara terpadu dan kontekstual. Sejarah perkembangannya menunjukkan bahwa IPS tidak berkembang secara linear, melainkan melalui berbagai dinamika, perdebatan, dan penyesuaian terhadap tuntutan zaman. Di tingkat global, khususnya di Amerika Serikat, IPS berkembang melalui peran NCSS dan berbagai gerakan pembaruan seperti *the new social studies* dan *reflective inquiry*.

Di Indonesia, IPS diadopsi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional, dengan menekankan pembentukan warga negara yang berlandaskan nilai Pancasila. Sejak resmi masuk dalam kurikulum nasional pada tahun 1975, IPS terus mengalami penyempurnaan baik dari segi struktur maupun pendekatan pembelajaran.

Dengan demikian, IPS dapat dipahami sebagai bidang pendidikan yang memiliki peran fundamental dalam membangun literasi sosial, kesadaran kewarganegaraan, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kajian sejarah perkembangan IPS menjadi dasar penting bagi pengembangan pembelajaran IPS yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Nabilla Nur, et al. "Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia pada Tingkat Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar* 6.1 (2022)
- Hidayat, Bobi. "Tinjauan historis pendidikan ips di Indonesia." *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia* 4.2 (2020)
- Palawa, Alimuddin Hassan, Zacky Ramadhan, Afifah Aththahirah, and Ali Saudi Harahap. "PERKEMBANGAN IPS TERPADU DI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PENDIDIKAN NASIONAL." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025)
- Saputra, B., Simorangkir, G. V., Habibah, S., Chan, F., & Noviyanti, S. Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, (2024)
- Susanti Emilia, Akmal, Pengantar IPS Terpadu dan Pembelajarannya,, Kreasi Edukasi, 2025.12-17